

E-APARATUR

PROPOSAL KERJASAMA

- ANALISIS JABATAN
- ANALISIS BEBAN KERJA
- EVALUASI JABATAN



**PENERAPAN APLIKASI E-APARATUR
UNTUK ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDEKS CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI
DI INSTANSI PEMERINTAH**

2022

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Pengantar	3
1. Latar Belakang.....	4
2. Permasalahan.....	5
3. Solusi.....	5
4. Tujuan dan Sasaran	12
5. Rujukan Peraturan	12
6. Organisasi Pengguna E-Aparatur	14
7. Indikator Keluaran, Output, Sasaran.....	14
8. Fitur Aplikasi	15
9. Ukuran Capaian	16
10. Materi Pelatihan	17
11. Pelatihan	18
12. Peta Jalan Aplikasi.....	20
13. Penutup	20
14. Lampiran	21

Pengantar

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, muncullah PerMenPANRB No. 25 Tahun 2016 tentang Jabatan Pelaksana. Keseluruhan aturan tersebut mengarah pada satu simpulan setiap instansi harus memiliki Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Penerapan peraturan yang mengatur tentang Analisis Jabatan (AnJab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) beserta turunannya di lingkungan instansi pemerintahan Indonesia menerapkan beberapa versi format pelaporan dengan kompleksitas yang tinggi, yaitu:

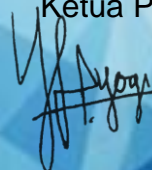
1. Analisis Jabatan (AnJab) terdapat 3 (tiga) peraturan, yaitu: 1) Perka BKN No. 12 Tahun 2011, 2), PermenPANRB No. 1 Tahun 2020, dan 3) Permendagri No. 35 Tahun 2012;
2. Analisis Beban Kerja (ABK) terdapat 4 (empat) peraturan, yaitu: 1) PermenPANRB No. 1 Tahun 2020 PermenPANRB No. 1 Tahun 2020, 2) PerKa BKN No. 19 Tahun 2011, 3) PerMenPANRB No. 26 Tahun 2011, dan 4) PerMendagri No. 26 Tahun 2011;
3. Evaluasi Jabatan (EvJab) terdapat 2 (dua) peraturan, yaitu: 1) PerKa BKN No. 21 Tahun 2011, dan 2) PerMenPANRB No. 34 Tahun 2011;
4. Harga Jabatan, yaitu: PerMenPANRB No. 63 Tahun 2011;
5. Standar Kompetensi Jabatan terdapat 2 (dua) peraturan, yaitu : 1) Perka BKN No. 13 Tahun 2013, dan 2) PerMenPANRB No. 38 Tahun 2017.

Dengan kompleksnya peraturan beserta turunannya tersebut di atas, kami SDD Consultant bekerjasama dengan Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Kelompok Keahlian: Reformasi Birokrasi dan *Local Governance* - FISIP Universitas Padjadjaran: telah berhasil menyederhanakan peraturan tersebut beserta pemetaannya (*mapping*) terhadap *business process* yang sesuai dengan karakteristik masing-masing instansi pemerintahan melalui aplikasi berbasis web yang bernama E-Aparatur dengan Nomor Registrasi HAKI EC00201703852.

Aplikasi ini telah digunakan di beberapa instansi pemerintahan sejak tahun 2017 hingga 2022, diantaranya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Papua, Pemda Kab. Bekasi, Pemda Kab. Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kab. Jayapura, Pemerintah Kota Sukabumi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Aplikasi ini berguna sebagai salah satu tahapan penunjang penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi / Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (TCPRBI).

Demikian pengantar proposal kerjasama yang dapat kami sampaikan, semoga kerjasama ini dapat terwujud sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di Instansi Pemerintahan di Indonesia. Atas perhatian Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 1 Juli 2022
 Ketua Peneliti,



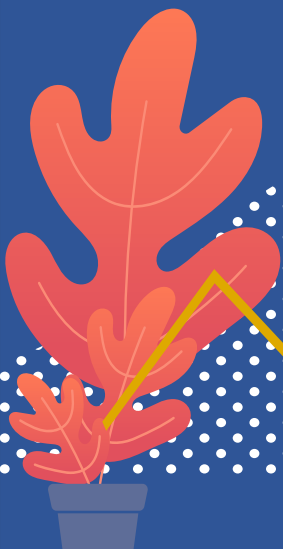
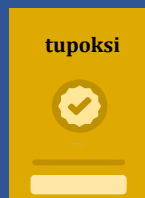
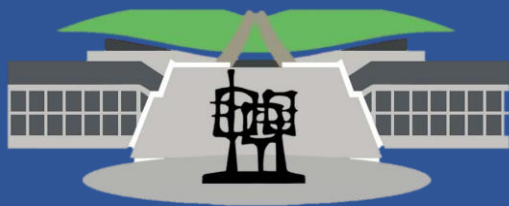
Yogi Suprayogi Sugandi, Ph.D.



1. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan tersebut akan dicapai antara lain melalui berbagai kegiatan, salah satu diantaranya adalah penataan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 pasal 56 menyatakan bahwa dalam melakukan Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 6 menyatakan bahwa Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang diatur dalam Peraturan Menteri.



Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara dari Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan sehingga Pemerintah Daerah memiliki ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut.

2. Permasalahan

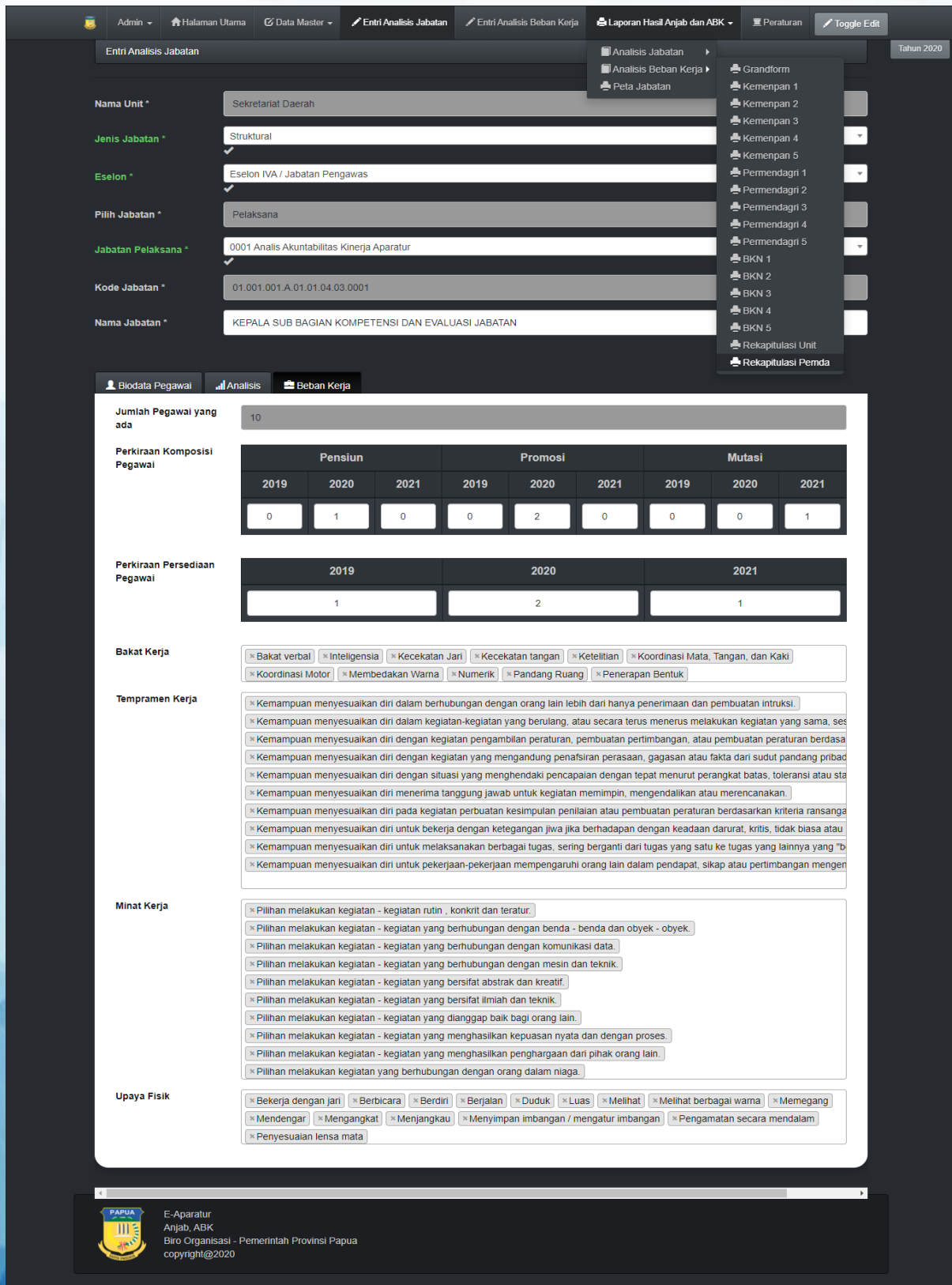
Permasalahan yang sering muncul di tiap unit kerja Intansi Pemerintah pengolah dan pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, maupun Standar Kompetensi Jabatan, adalah sebagai berikut:

1. Adanya tumpang tindih peraturan dalam melaksanakan proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Saat ini, pedoman pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Pemerintah Daerah berasal dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
2. Data terkait analisis jabatan dan beban kerja yang masih dibuat dalam konsep excel dengan proses *offline* yang memakan waktu yang panjang;
3. Tidak adanya sistem, aplikasi, server yang mendukung akses Pemerintah Daerah dalam mengakses kebutuhan data kapanpun dan dimanapun menggunakan peralatan elektronik yang terkoneksi dengan internet.
4. Banyaknya aplikasi dari Pusat yang parsial tidak terintegrasi dalam satu wadah, sehingga musti pindah-pindah aplikasi, serta output nya tidak dapat atau di mengakomodir kemudahan untuk dijadikan data mentah siap saji untuk pengolahan lanjut ke sistem online tunjangan kinerja yang dibangun di masing-masing instansi pemerintah daerah.

3. Solusi

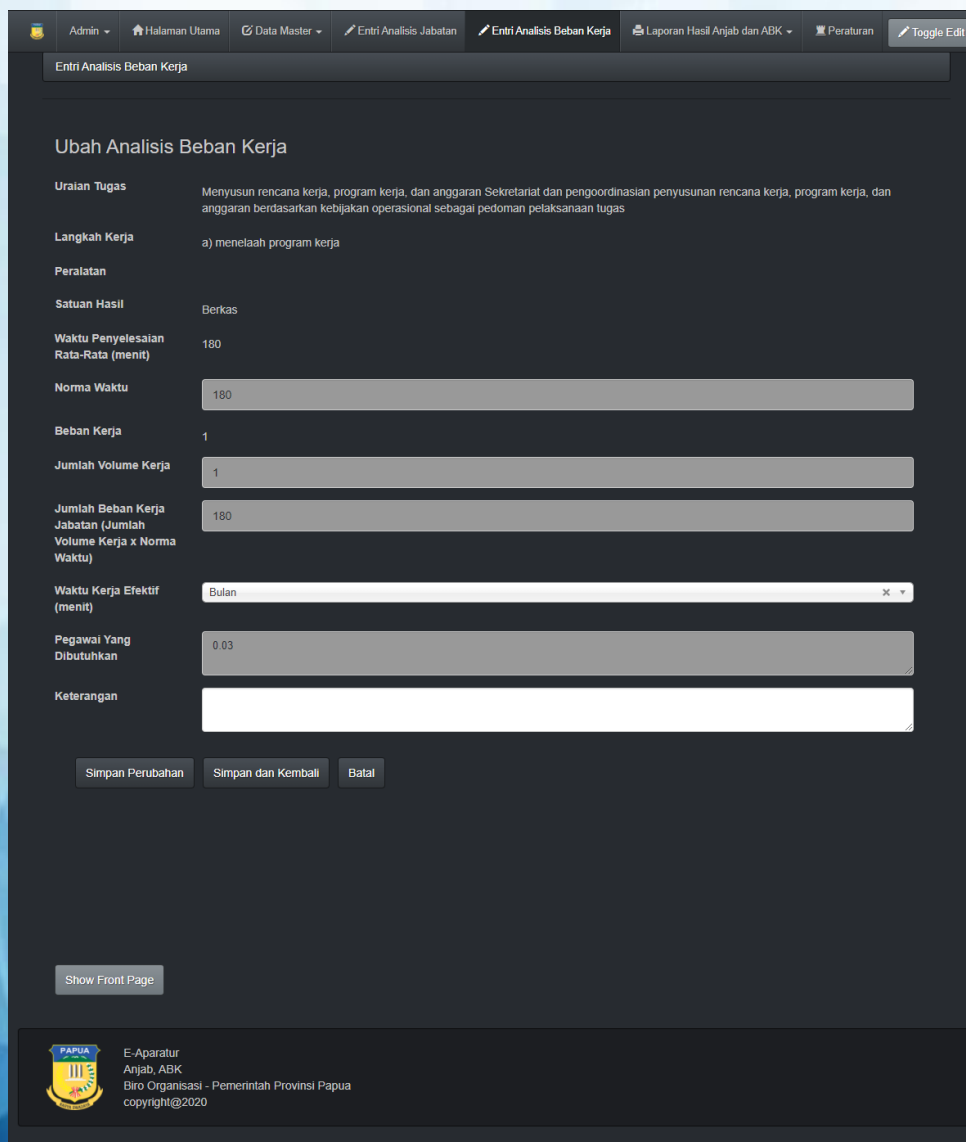
Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik: Kelompok Keahlian Reformasi dan Local Governance - FISIP Universitas Padjadjaran mencoba memberikan solusi mengenai permasalahan analisis jabatan

dan analisis beban kerja yang ada dengan merumuskan sebuah aplikasi yang bernama E-Aparatur.



Gambar 1.1 E-Aparatur

E-Aparatur dikembangkan pada Tahun 2017 dengan menjawab kebutuhan penataan kepegawaian di Pemerintah Daerah dalam melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi kerja pada Pemerintah Daerah. E-Aparatur merupakan aplikasi yang bersifat *offline* dan *online* yang terinstall pada server atau cloud yang mendukung proses pengisian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi kerja dalam satu tempat dan satu waktu serta *printing report* sesuai dengan kebutuhan peraturan analisis jabatan dan beban kerja yang dibutuhkan seperti yang terlihat pada Gambar 1.2, Untuk melakukan proses pengisian jabatan user hanya perlu melakukan klik dan input data pada menu entri analisis jabatan dan proses pengisian analisis beban kerja dengan melakukan klik pada menu entri analisis beban kerja. Sebagai contoh gambaran untuk mencoba simulasi dapat meng-akses halaman situs <https://e-aparatur.papua.go.id>




The screenshot shows a web application interface for 'Ubah Analisis Beban Kerja'. The top navigation bar includes 'Admin', 'Halaman Utama', 'Data Master', 'Entri Analisis Jabatan', 'Entri Analisis Beban Kerja', 'Laporan Hasil Anjab dan ABK', 'Peraturan', and 'Toggle Edit'. The main content area contains the following fields:

- Uraian Tugas:** Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran Sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran berdasarkan kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Langkah Kerja:** a) menelaah program kerja
- Peralatan:**
- Satuan Hasil:** Berkas
- Waktu Penyelesaian Rata-Rata (menit):** 180
- Norma Waktu:** 180
- Beban Kerja:** 1
- Jumlah Volume Kerja:** 1
- Jumlah Beban Kerja Jabatan (Jumlah Volume Kerja x Norma Waktu):** 180
- Waktu Kerja Efektif (menit):** Bulan
- Pegawai Yang Dibutuhkan:** 0.03
- Keterangan:**

Buttons at the bottom include 'Simpan Perubahan', 'Simpan dan Kembali', 'Batal', and 'Show Front Page'. The footer contains the logo of the Papua Provincial Government and the text: 'E-Aparatur Anjab, ABK Biro Organisasi - Pemerintah Provinsi Papua copyright@2020'.

Gambar 1.2 Menu Proses Entri Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Kemudian hasil dari proses input analisis jabatan dan beban kerja dapat diunduh dan dicetak dalam format *.pdf yang bisa disesuaikan dengan peraturan yang diperlukan seperti pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4 di bawah ini.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
INFORMASI JABATAN

Jabatan Struktural

1. **Nama Jabatan**
SEKRETARIS DAERAH
2. **Kode Jabatan**
01.001.001.A.01.
3. **Unit Kerja**
 - 01.001.001.A. Sekretariat Daerah
4. **Ikhtisar Jabatan**
5. **Uraian Tugas**

Uraian Tugas	Uraian Jabatan	Hasil kerja	Hasil kerja		Prestasi kerja	
			Jumlah	Waktu	Jumlah	Waktu
Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran Sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran berdasarkan kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas	a) menelaah program kerja	Berkas	1	180	1	180
Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran Sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran berdasarkan kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas	b) mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan	6	180	6	180
Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran Sekretariat dan	c) mengkoordinasikan Penyusunan RKA	Kegiatan	2	240	2	240

1 / 8

Gambar 1.3 Report Analisis Jabatan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
ANALISIS BEBAN KERJA

Unit Kerja : 01.001.001.A. Sekretariat Daerah
 Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

No	Uraian Tugas	Peralatan	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Rata-Rata (menit)	Norma Waktu	Waktu Kerja Efektif (menit)	Beban Kerja	Jumlah Volume Kerja	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan (Jam)	Pegawai Yang Dibutuhkan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai yang ada	+/-	EJ	PJ	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran Sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran berdasarkan kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas		Berkas	180	180	6000	1	1	180	152	0.03	0.12	50	49.88	0	E : Kurang	
2.	Menyusun rencana kerja,		Kegiatan	180	180	72000	6	6	1080		0.02						

1 / 12

Gambar Gambar 1.4 Report Analisis Beban Kerja

Untuk mempermudah proses pengawasan dalam proses pengisian aplikasi E-Aparatur pada Gambar 1.5 menawarkan konsep 1 username untuk 1 SKPD dan perubahan data master yang dikendalikan oleh 1 admin, hal ini dilakukan agar proses pengisian bisa obyektif tanpa ada gangguan terkait pengisian hingga cetak laporan akhir.

Admin ▾ | Halaman Utama | Data Master ▾ | Entri Analisis Jabatan | Entri Analisis Beban Kerja | Laporan Hasil Anjab dan ABK ▾ | Peraturan | Toggle Edit

Data Master Tahun 2020

Analisis Jabatan

 Daftar Pelaksana	 Unit Organisasi	 Daftar Eselon
 Jenis Jabatan	 Daftar Golongan	 Perangkat/Alat Kerja
 Daftar Urusan <small>Tambah, Ubah, dan Hapus Urusan</small>	 Bahan Kerja	 Obyek/Sasaran Pekerjaan
 Upaya Fisik	 Tempramen Kerja	 Bakat Kerja
 Minat Kerja	 Hub. Jabatan dengan Data	 Hub. Jabatan dengan Orang
 Hub. Jabatan dengan Benda	 Model Jabatan	 Struktur Jabatan

E-Aparatur
 Anjab, ABK
 Biro Organisasi - Pemerintah Provinsi Papua
 copyright@2020

Gambar 1.5 Pengelolaan User dan Data Master

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
 INFORMASI PETA JABATAN

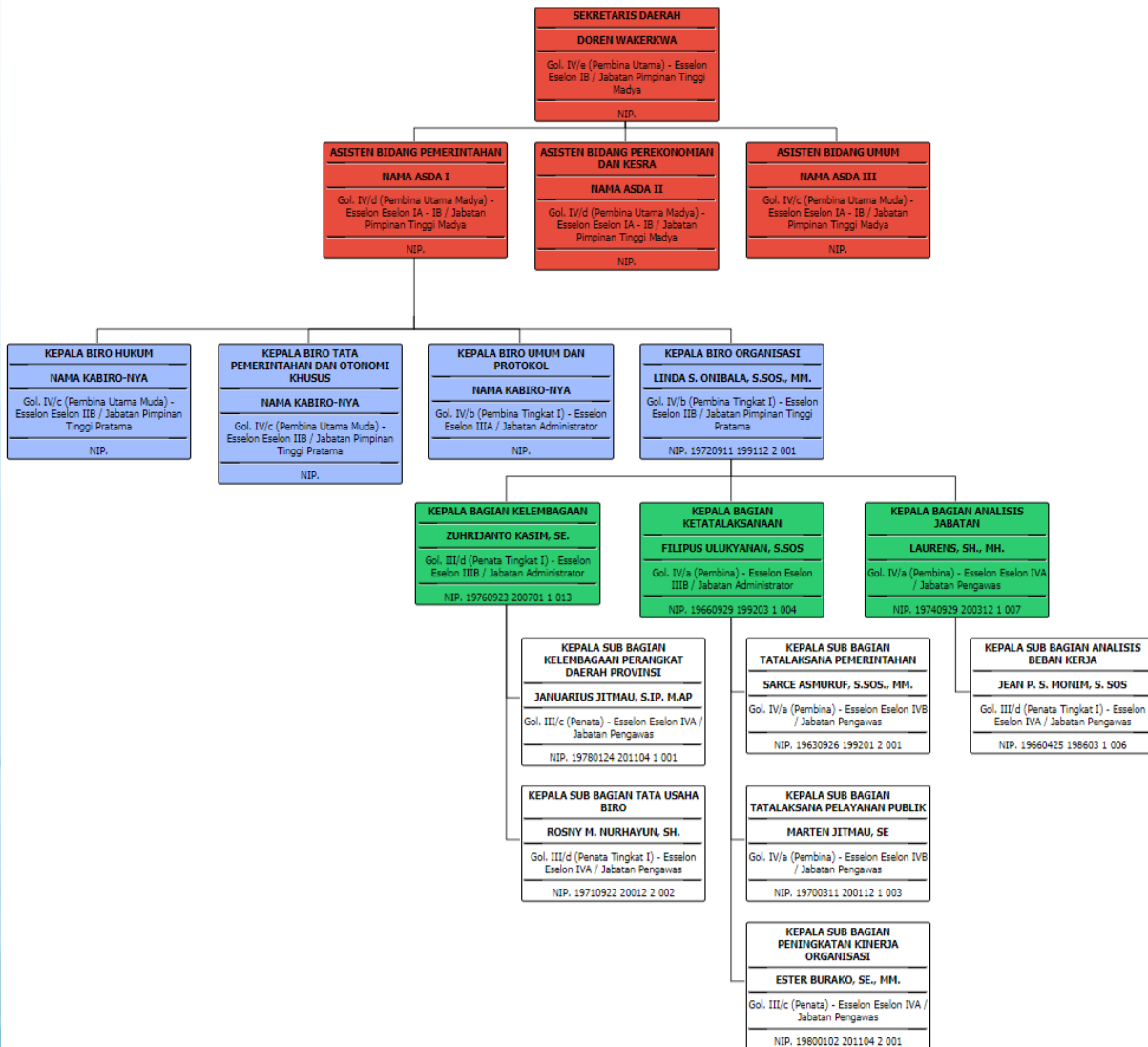
Cetak

Simpan PNG

Perbesar

Perkecil

Ulang



Gambar 1.6 Peta Jabatan

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

1. Untuk membantu dan memudahkan instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan dengan format-format data serta langkah yang ada.
2. Untuk membantu instansi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan kepegawaian yang sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan organisasi dan tata laksana di lingkup pemerintahan daerah.

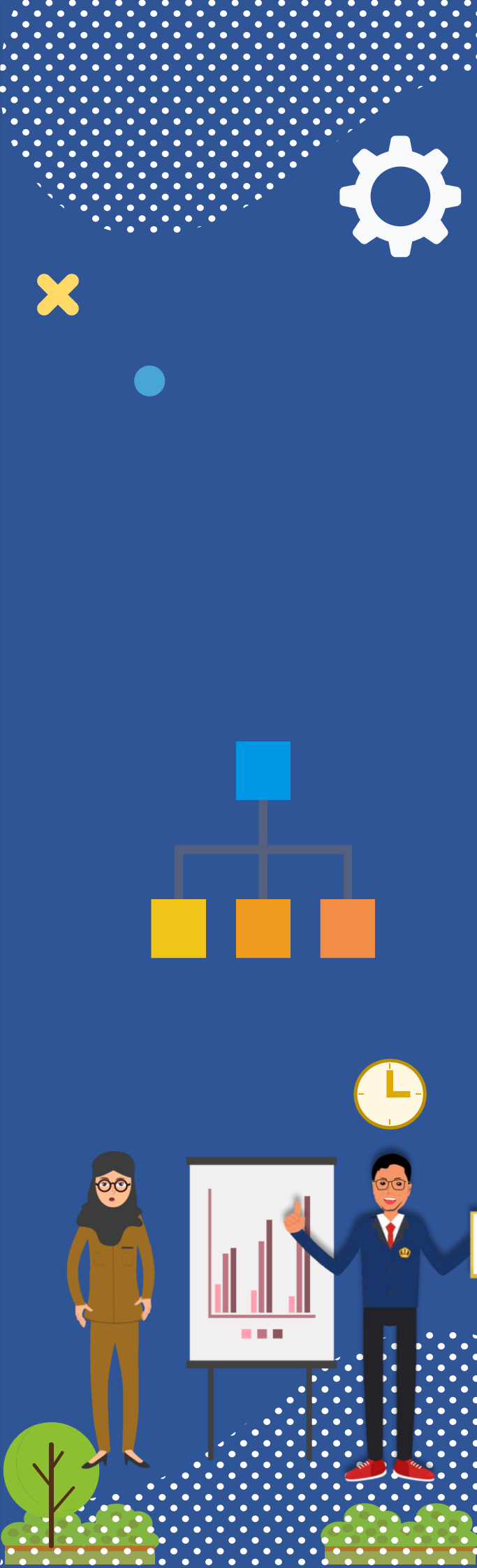
Sasaran

Aplikasi ini digunakan seluruh instansi Pemerintah Daerah dalam proses pengisian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan.

5. Rujukan Peraturan

Rujukan Peraturan Perundangan Pusat:

1. Undang – Undang (UU) No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang – Undang (UU) No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah



4. Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No 25 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.

Rujukan Peraturan Analisis Jabatan:

1. Permenan RB No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
2. Perka BKN No 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
3. Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Rujukan Peraturan Analisis Beban Kerja :

1. Perka BKN No 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
2. Permendagri No 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
3. Permenpan-RB No 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah

Rujukan Peraturan Evaluasi Jabatan :

1. Perka BKN No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS
2. Permenpan-RB No 34 Tahun 2011 Tentang Evaluasi Jabatan

Rujukan Peraturan Standar Kompetensi Jabatan :

1. Perka BKN No 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil
2. Permenpan-RB No 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Peraturan di tingkat Pemerintah Daerah:

1. Peraturan Gubernur (Pergub)
2. Peraturan Walikota (Perwal)
3. Peraturan Bupati (Perbup)

6. Organisasi Pengguna E-Aparatur

Organisasi Pengguna dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (E-Aparatur) ini adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah; Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah di Seluruh Indonesia.

7. Indikator Keluaran, Output, Sasaran

1. Indikator

- (1) Tersusunnya pedoman Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia;
- (2) Terwujudnya akurasi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja aparatur;
- (3) Adanya Sistem Informasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan yang terkomputerisasi secara online.

2. Keluaran

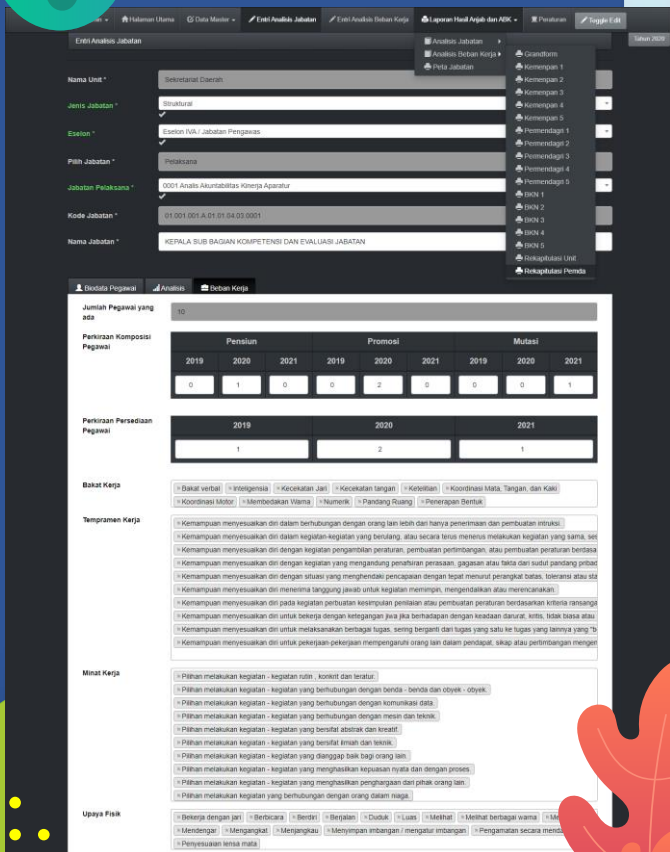
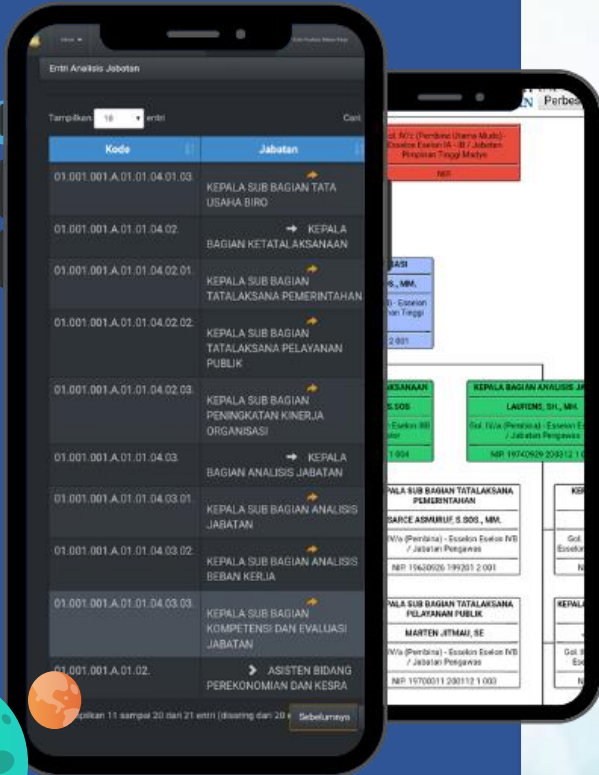
- a. Memperluas akses data dan informasi kinerja aparatur yang akuntabel;
- b. Tersedianya informasi kinerja aparatur daerah yang akurat, cepat dan tepat;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Sasaran

1. Tersusunnya pedoman Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan berdasarkan peraturan yg berlaku di Indonesia;
2. Meningkatnya akurasi dan transparansi kinerja aparatur;
3. Tersedianya Sistem Informasi Kinerja aparatur daerah yang terkomputerisasi secara online;
4. Tercapainya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi / Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (TPCRBI).

8. Fitur Aplikasi

- Entry Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Laporan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja;
- Evaluasi Jabatan;
- Standar Kompetensi Jabatan;
- Daftar Peraturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Mencakup 3 peraturan, yaitu dari:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - c. Peraturan Kepala Badan Kependidikan Nasional.



9. Ukuran Capaian

Ukuran	Penjelasan	Indikator Capaian	
Measurable	Ukuran keberhasilan: memuat keluaran kegiatan secara kualitatif dan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya penyusunan form Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja baik Jabatan Struktural dan Fungsional. 2. Terdidik dan terlatihnya birokrasi di Instansi Pusat atau Instansi Pemerintah Daerah dalam penyusunan form Analisis Jabatan dari berbagai peraturan. 3. Tersistematikanya Peta Jabatan dan Organisasi Instansi. 4. Terekapitulasinya Unit dan Instansi untuk jumlah keseluruhan Formasi dan Beban Kerja. 	
Achievable	Tingkat ketercapaian pelaksanaan: memuat kondisi pelaksana dan lingkungannya saat melaksanakan kegiatan	Normal, dengan asumsi pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai prosedur	
Sumber Daya	Sumber daya / input: memuat hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	SDM	Team Konsultan, Engineer dan Pemda
		Alat dan Bahan	Perangkat computer dan jaringan
		Data dan informasi	Perda dan Pergub/Perwal/Perbub yang mengatur struktur organisasi dan tata kelola organisasi perangkat daerah



Pelatihan dan Materi yang kami sediakan dalam Sistem Informasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan ini terdiri dari 2 yaitu:

1. Pelatihan dan Materi Admin
2. Pelatihan dan Materi Operator

10. Materi Pelatihan

Pelatihan	Materi	Min Peserta	Max Peserta
Admin	Teori Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	5	10
	Peraturan – Peraturan	5	10
	Kesisteman E-Aparatur	5	10
	Proses Bisnis E-Aparatur	5	10
Operator	Teori Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	50	100
	Peraturan – Peraturan	50	100
	Kesisteman E-Aparatur	50	100

11. Pelatihan

No	Materi	Admin	Operator	Waktu			Jml
				Teori	Penu- gasan	Praktek Lapangan	
Materi Aplikasi							
1	Ekspose Aplikasi E-Aparatur						
a	Pengenalan Aplikasi	1	1	2	0	0	2
b	Pemaparan Konten	1	1	0	0	12	12
2	Simulasi Aplikasi Menu Entri Data Analisis jabatan (satu unit)	1	1	0	0	10	10
3	Teknis Aplikasi						
a	Pengenalan Database	1	0	0	0	6	6
b	Pengenalan Data Master dan Entri Data Master	1	0	0	0	6	6
c	Memperbaiki Database	1	0	0	0	2	2
d	Admin mampu menyajikan Data Master	1	0	0	0	10	10
48 SKS							

No	Materi	Ad- min	Opera- tor	Waktu			Jml
				Teori	Penu- gasan	Praktek Lapangan	
I Paket Materi Dasar							
1	Manajemen Sumber Daya Manusia	1	1	12	1	0	13
2	Teori Organisasi dan Manajemen	1	1	12	1	0	13
							26 SKS
II Paket Materi Inti							
1	Konsep Analisis Jabatan	1	1	2	0	0	2
a	Analisis Jabatan versi BKN No 12 Tahun 2011	1	1	8	2	2	12
b	Analisis Jabatan versi Permenpanrb No 1 Tahun 2020	1	1	8	2	2	12
b	Analisis Jabatan versi Permendagri No 35 Tahun 2012	1	1	8	2	2	12
2	Konsep Analisis Beban Kerja	1	1	2	0	0	2
a	Analisis Beban Kerja versi Kepmenpan No 1 Tahun 2020	1	1	5	0	1	6
b	Analisis Beban Kerja versi Permendagri No 12 Tahun 2008	1	1	10	0	2	12

No	Materi	Ad min	Opera- tor	Waktu			Jml
				Teori	Penu- gasan	Praktek Lapangan	
c	Analisis Beban Kerja versi Permenpanrb No 26 Tahun 2011	1	1	5	0	1	6
d	Analisis Beban Kerja versi Perka BKN No 19 Tahun 2011	1	1	10	0	2	12
3	Penyusunan Laporan Analisis Jabatan	1	1	2	0	0	2
a	Format Mendagri	1	1	0	0	4	4
b	Format BKN	1	1	0	0	4	4
c	Format Menpan	1	1	0	0	4	4
4	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	1	1	2	0	0	2
a	Format Mendagri	1	1	0	0	4	4
b	Format BKN	1	1	0	0	4	4
c	Format Menpab	1	1	0	0	4	4
5	Penyusunan Evaluasi Jabatan	1	1	0	0	4	4
							108 SKS
III	Paket Materi Penunjang						
1	UU No 5 thn 2014	1	1	2	0	0	2
2	UU No 23 thn 2014	1	1	2	0	0	2
3	PP 18 thn 2016	1	1	2	0	0	2
4	Permenpanrb no 25 thn 2016	1	1	2	0	0	2
5	PP Manajemen PNS No 11 thn 2017	1	1	2	0	0	2
							10 SKS

12. Peta Jalan Aplikasi



13. Penutup

Demikian proposal kerjasama yang dapat kami sampaikan, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan berbasis elektronik (E-Aparatur) bagi Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintahan.

14. Lampiran

FOTO SUASANA PELATIHAN MATERI DASAR, MATERI INTI, MATERI PENUNJANG DAN PENGGUNAAN APLIKASI

